

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fadiya Salma Sukman, Sri Fadilah, Nurhayati*

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fadiyasalma08@gmail.com, srifadilah03@gmail.com, nurhayatinom@gmail.com

Abstract. This research is based on the government's performance which is still considered to be poor, especially in public services. In addition, there are several local governments that still depend on external funds such as transfer funds. So this study aims to examine the influence of financial independence on the financial performance of local governments. In collecting data, the researcher used the saturated sample method. So that the sample used in this study is 5 Regional Governments in Greater Bandung with an observation range of seven years 2017-2023 so that 35 observations were obtained.. The research methods used by the researcher are verifiable and descriptive analysis methods with a quantitative approach. In this study, the direct linear regression analysis method was used to examine the hypothesis. The results of the tests conducted show that financial independence affects the financial performance of local governments. A high level of independence indicates that the government has a greater capacity to manage resources independently, as well as has greater flexibility in planning and implementing development policies and programs.

Keywords: *Financial Independence, Financial Performance. Local Government*

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada kinerja pemerintah yang dinilai masih kurang baik terutama dalam pelayanan publik. Selain itu ada beberapa pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana eksternal seperti dana transfer. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengambilan data, peneliti menggunakan metode sampel jenuh. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5 Pemerintah Daerah di Bandung Raya dengan rentang pengamatan tujuh tahun 2017-2023 sehingga diperoleh 35 pengamatan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis verifikatif dan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode analisis regresi linier langsung digunakan untuk memeriksa hipotesis. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat independensi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya secara mandiri, serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan.

Kata Kunci: *Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah*

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah adalah entitas yang memiliki otoritas dari negara untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayahnya. Sebagai organisasi publik, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kepentingan nasional sesuai regulasi yang berlaku. Melalui implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah diberdayakan untuk mengambil keputusan secara mandiri, mengelola sumber daya berdasarkan prioritas, kepentingan, dan potensi wilayah masing-masing.

Melalui otonomi daerah adalah upaya untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan secara mandiri serta bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan potensi karakteristik. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah mengoptimalkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif.

Pelaksanaan layanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sering menjadi sorotan publik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang diterima dari layanan tersebut, yang kerap dianggap kurang optimal, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan dan pengeluaran anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mengelola penerimaan dan belanja daerah melalui sistem keuangan yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, khususnya terkait dengan layanan publik. Namun, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), 19% atau 105 pemerintah daerah masih menunjukkan kinerja yang kurang memadai dalam layanan investasi. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang belum optimal, sebagaimana dilaporkan oleh IDXChannel. Reformasi kebijakan, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dirancang untuk meningkatkan iklim investasi.

Meskipun demikian, masalah pelayanan publik masih menjadi keluhan utama masyarakat di Bandung Raya, seperti kemacetan yang disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Selain itu, minimnya penerangan jalan di sejumlah ruas menjadi kekhawatiran karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau tindakan kriminal.

Salah satu elemen kunci yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah tingkat kemandirian finansial pemerintah daerah. Rasio keuangan menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai operasi pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri digunakan untuk mengukur independensi ini. Kontribusi Pendapatan Asli (PAD) terhadap total pendapatan daerah, dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti pinjaman atau transfer dari pemerintah pusat, digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan. Tingkat ketergantungan ditunjukkan oleh rasio ini. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sektor-sektor berpotensi untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan standar pelayanan publik untuk meningkatkan kemandirian. (Fadilah, S, Nurleli. N & Nurcholisah. K, 2020).

Kapasitas fiskal Provinsi Jambi pada tahun 2022 masih tergolong "sangat rendah," dengan rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah mencapai 62,81% selama periode 2017 hingga 2024. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Situasi serupa terjadi di Kabupaten Sumedang, di mana hingga September 2024, kontribusi PAD baru mencapai Rp 611 miliar atau 66,82% dari target. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengurangi ketergantungan pada dana transfer dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak serta retribusi daerah. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan mendorong kemandirian keuangan secara berkelanjutan.

Penelitian terhadap variabel kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah diteliti oleh peneliti sebelumnya menemui hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fera dan Rhea, 2019), (Dessy dan Sri, 2022) dan (Nur Shafira, 2020) yang menyatakan rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang berbeda dibuktikan oleh (Doni, Tumija, dan Ika, 2023) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Situasi yang saat ini terjadi di Bandung Raya sangat relevan dengan penelitian ini, mengingat berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Beberapa isu penting yang menjadi latar belakang penelitian ini meliputi kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pembangunan daerah (Fadilah.S, dkk., 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah untuk penelitian ini yaitu apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Bandung Raya selama periode 2017-2023? Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kemandirian daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Bandung Raya selama periode 2017-2023.

B. Metode

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode verifikatif dan deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dokumentasi berupa laporan keuangan pemerintah daerah di Bandung Raya pada periode 2017-2023 serta situs resmi dan website pemerintah daerah. Menggunakan analisis regresi sederhana, populasi pada penelitian ini yaitu pemerintah daerah di Bandung Raya berjumlah 5 pemerintah daerah. Menggunakan teknik sampel jenuh, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian atau 35 data pengamatan pada periode 2017-2023 (Fadilah. S., dkk, 2022). Data variabel independen yaitu Kemandirian Keuangan (X) adapun rumus perhitungan variabel sebagai berikut:

Kemandirian Keuangan

Pengukuran kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari proposi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, yang juga mencakup pendapatan dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \left(\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \right) \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat kemandirian dari kemandirian keuangan secara lengkap dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kemandirian

Kemandirian (%)	Kriteria
$E \geq 75\%$	Sangat Mandiri
$50\% \leq E < 75\%$	Mandiri
$25\% \leq E < 50\%$	Cukup Mandiri
$10\% \leq E < 25\%$	Kurang Mandiri
$E < 10\%$	Tidak Mandiri

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah rasio yang akan digunakan yaitu rasio efisiensi. Untuk menghitung efisiensi pendapatan asli daerah dapat gunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \left(\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \right) \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efisiensi dari kinerja keuangan secara lengkap dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efisiensi

Efisiensi (%)	Kriteria
$E \geq 100\%$	Tidak Efisien
$90\% \leq E < 100\%$	Kurang Efisien
$80\% \leq E < 90\%$	Cukup Efisien
$60\% \leq E < 80\%$	Efisiensi
$E < 60\%$	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Pada hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengamatan yang sudah sesuai dengan sampel penelitian yaitu 5 pemerintah daerah sebagai sampel dikalikan dengan jumlah periode penelitian sebanyak 7 tahun, yaitu 2017-2023 sehingga diperoleh sebanyak 35 sampel data.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	X_KKD	Y_KKPD
Date: 01/28/25 Time: 08:39		
Sample: 2017 2023		
Mean	0.372151	0.935048
Median	0.285136	0.907196
Maximum	0.822218	1.130612
Minimum	0.182301	0.810601
Std. Dev.	0.189713	0.084167
Skewness	1.196391	0.456879
Kurtosis	3.060571	2.079686
Jarque-Bera	8.354906	2.452814
Probability	0.015338	0.293345
Sum	13.02528	32.72668
Sum Sq. Dev.	1.223692	0.240860
Observations	35	35

Sumber: Data Olahan *Eviews* 12, 2025

Analisis Statistik Kemandirian Keuangan

Statistik deskriptif Kemandirian Keuangan dapat diketahui menurut kriteria kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 yaitu nilai minimum sebesar 0.182301 atau 18.23% termasuk kurang mandiri, nilai maksimum sebesar 0.822218 atau 82.22% termasuk kriteria sangat mandiri, nilai rata-rata sebesar 0.372151 atau 37.21% termasuk dalam kriteria cukup mandiri dan nilai standar deviasi sebesar 0.189713 serta nilai median sebesar 0.285136.

Analisis Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan

Statistik deskriptif Kinerja Keuangan menurut kriteria kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 yaitu nilai minimum sebesar 0.810601 atau 81.06% termasuk cukup efisien, nilai maksimum sebesar 1.130612 atau 113.06% termasuk kriteria tidak efisien, nilai rata-rata sebesar 0.935048 atau 93.50% termasuk dalam kriteria kurang efisien dan nilai standar deviasi sebesar 0.084167 serta nilai median sebesar 0.907196.

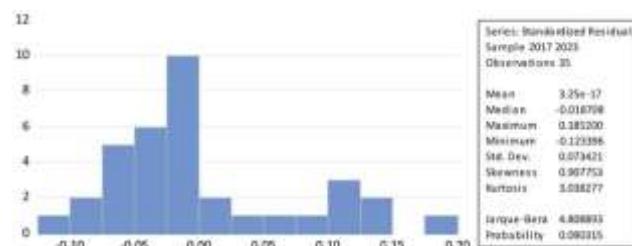
Analisis Verifikatif

Pemilihan Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan *software evIEWS* 12 pada data panel dibutuhkan pemilihan model regresi linear terlebih dahulu. Uji yang perlu dilakukan yaitu uji *chow*, uji *hausmant*, uji *lagrange multiplier*.

Berdasarkan dari tiga pengujian tersebut dalam penelitian ini diketahui bahwa model *Common Effect Model* (CEM) terpilih sebanyak dua kali. Oleh sebab itu, model estimasi yang regresi linear sederhana yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *Common Effect Model* (CEM).

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Olahan *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan pada gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari variabel kemandirian keuangan sebesar $0.090315 \geq 0.05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Regresi Linear Sederhana Data Panel

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.051087	0.033772	1.512698	0.1399
LOG(X_KKD)	0.111636	0.028648	3.896751	0.0005

Sumber: Data Olahan *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear sederhana untuk data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Keuangan} = 0.051087 + 0.111636 \text{ Kemandirian Keuangan} + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear sederhana di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini:

Nilai konstanta (α) sebesar 0.051087 yang menunjukkan jika variabel independen yaitu Keuangan (X) bernilai 0 (nol), maka variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y) akan bernilai sebesar nilai konstanta yaitu 0.051087.

Regresi variabel Kemandirian Keuangan bernilai positif sebesar 0.111636 menunjukkan bahwa jika variabel Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah di Bandung Raya periode 2017-2023 memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika kemandirian keuangan mengalami peningkatan, maka diprediksikan Kinerja Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0.111636.

Uji t (Uji Koefisien Regresi)

Tabel 5. Hasil Uji t (Uji Koefisien Regresi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.051087	0.033772	1.512698	0.1399
LOG(X_KKD)	0.111636	0.028648	3.896751	0.0005

Sumber: Data Olahan *Eviews* 12, 2025

Pada tabel 5 dapat diinterpretasikan bahwa variabel kemandirian keuangan memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0005 \leq 0.05$ maka Kemandirian Keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Bandung Raya periode 2017-2023.

Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 6. Hasil Koefisien Deteminasi R^2

R-squared	0.315135	Mean dependent var	-0.071017
Adjusted R-squared	0.294381	S.D. dependent var	0.088719
S.E. of regression	0.074525	Akaike info criterion	-2.299914
Sum squared resid	0.183282	Schwarz criterion	-2.211037
Log likelihood	42.24850	Hannan-Quinn criter.	-2.269234
F-statistic	15.18467	Durbin-Watson stat	1.241833
Prob(F-statistic)	0.000451		

Sumber: Data Olahan *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan pada tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai dari R^2 sebesar 0.315135 atau 31.51%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Kemandirian Keuangan sebesar 31.51%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini, seperti kewajiban hutang, belanja daerah, tingkat ukuran pemerintah, pajak daerah dan variabel lain yang mungkin ikut berkontribusi dalam mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2023

Bersumberkan hasil uji t variabel kemandirian keuangan menunjukkan nilai probabilitas $0.0005 \leq 0.05$, yang berarti kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Bandung Raya periode 2017-2023. Serta variabel Kemandirian Keuangan bernilai positif sebesar 0.111636 menunjukkan bahwa jika Kemandirian Keuangan pada Pemerintah Daerah di Bandung Raya periode 2017-2023 mengalami peningkatan, maka diprediksikan Kinerja Keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0.111636. Hal menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. sejalan dengan tinggi rendahnya rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah meningkat seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal pajak dan retribusi yang dibayarkan. (Fadilah, S, Maemunah. M & Hernawati. N, 2019). Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, semakin tinggi pula rasio kemandirian daerah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah umumnya meliputi rasio kemandirian fiskal, yang mengukur proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan daerah, yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya alam, menjadi faktor utama dalam mengukur tingkat kemandirian tersebut (Fadilah. S & Maemunah. M, 2019).

Dampak dari kemandirian keuangan yang tinggi terhadap kinerja keuangan sangat. Dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pusat (Fadilah.R & Lestari.R, 2020). Hal ini memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, kemandirian yang tinggi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan lokal, yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan yang baik, pada gilirannya, memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan (Fadilah, dkk., 2021).

Penelitian yang dilakukan Permatasari dan Trinaningsih (2022) pada BPKAD pemerintah Provinsi Jawa Timur, Melina dan Swarmilah (2021) pada pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera, serta Nur Shafira (2020) mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ijtihad dan Iwan, 2024) pada BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan (Hakiki, Tumija dan Agustina, 2023) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang artinya tinggi rendahnya tingkat rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bandung Raya. Kemandirian yang tinggi meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, memperkuat kinerja keuangan, dan mendukung penyediaan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- BKPM Catat 105 Pemda Berkinerja Kurang Baik dalam Layanan Investasi*. (n.d.). Retrieved January 28, 2025, from <https://www.idxchannel.com/economics/bkpm-catat-105-pemda-berkinerja-kurang-baik-dalam-layanan-investasi>
- Fadilah, S., Lestari, R., Sahdan, M. H., & Khalid, A. Z. A. (2020). THE IMPACT OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE ASEAN COUNTRIES. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 602–608. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10589>
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community Social Empowerment in Zakat Community Development (ZCD). *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 460–470. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5127>
- Fadilah, S., Maemunah, M., Nurrahmawati, N., Lim, T. N., & Sundry, R. I. (2019a). FORENSIC ACCOUNTING: FRAUD DETECTION SKILLS FOR EXTERNAL AUDITORS. *Polish Journal of Management Studies*, 20(1), 168–180. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15>
- Fadilah, S., Maemunah, M., Nurrahmawati, N., Lim, T. N., & Sundry, R. I. (2019b). FORENSIC ACCOUNTING: FRAUD DETECTION SKILLS FOR EXTERNAL AUDITORS. *Polish Journal of Management Studies*, 20(1), 168–180. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.1.15>
- Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2020). *Sharia Audit in Zakat Institutions: Study at BAZNAS of West Java Province*. 36(2).
- Fadilah, S., Nurleli, N., Rosdiana, Y., Maemunah, M., & Nurcholisah, K. (2022). Multi-Weighted Analysis: Assessing the Performance of Social Empowerment in the Pandemic Era. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 206–214. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.9537>
- Fadilah, S., Nurleli, N., Rosdiana, Y., Nurcholisah, K., Maemunah, M., & Hartanto, R. (2021). Measuring The Performance of Zakat Programs Using The Activity Ratio. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.8301>
- Fadilah, S., Rosidana, Y., Maemunah, M., Hernawati, N., Sukarmanto, E., & Hartanto, R. (2021). MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS): SUSTAINABILITY ASSESSMENT MODEL OF COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT. *Polish Journal of Management Studies*, 24(2), 119–135. <https://doi.org/10.17512/pjms.2021.24.2.08>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Mengurangi Ketergantungan Dana Transfer—Kabupaten Sumedang. (n.d.). Retrieved January 28, 2025, from <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/mengurangi-ketergantungan-dana-transfer>

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. (n.d.). Retrieved January 28, 2025, from <https://www.jambiprov.go.id/berita-mengelola-defisit-anggaran-provinsi-jambi-tantangan-dan-solusi.html>

Sekaran, U., & Bougie, R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.

Sofianty, D., dkk. (2024). *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Bandung.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.